

**ANALISIS *AL-MAŞLAHAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA
KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA
PENCATATAN RUJUK**

SKRIPSI

Oleh:

**Anif An Ifaroh
NIM. C91215104**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anif An Ifaroh

NIM : C91215104

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Al-Maslahah* terhadap Pendapat Kepala
KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya
Pencatatan Rujuk

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Anif An Ifaroh

NIM. C91215104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ ANALISIS *AL-MAS’LAHAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK” yang ditulis oleh Anif An Ifaroh NIM. C91215104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anif An Ifaroh NIM. C91215104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 9 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

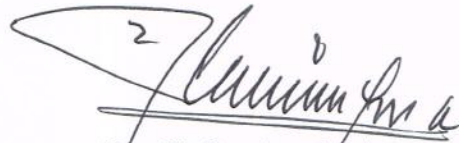
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



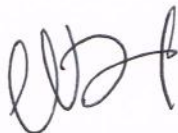
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



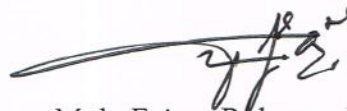
Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Hj. Nabiela Naili, S.SI., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 12 Juli 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANIF AN IFAROH
NIM : C91215104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : anifanifaroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN
SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

(Anif An Ifaroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis *Al-Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk**” adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) terkait masalah rujuk akibat talak *raj’i* putusan dari Pengadilan Agama yang tidak dicatatkan atau di sahkan di KUA. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk? 2) Bagaimana analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis menggunakan teori-teori *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk.

Hasil penelitian terhadap pendapat Kepala KUA menyatakan bahwa rujuk akibat talak *raj'i* yang kasusnya sudah dibawa ke Pengadilan Agama, sudah diputus dan keluar akta cerainya jika sebelumnya telah melakukan rujuk masih dalam masa *iddah* yang hanya berdasarkan Fikih klasik saja, tidak ada saksi, tidak dicatatkan dan disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka rujuk tersebut harus diulang kembali di KUA, artinya dicatatkan atau di sahkan kembali di depan PPN di KUA untuk mengambil buku nikah di Pengadilan Agama. Sesuai dalam pasal 163-169 KHI dan Pasal 30, 31 Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Tinjauan *al-maslahah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk mengandung *maslahah*, yaitu dengan dicatatkan atau disahkannya kembali rujuk tersebut merupakan sesuatu yang dipandang baik untuk menarik suatu manfaat serta sejalan dengan tujuan syariat yang disebut sebagai *al-maslahah*. Diantaranya yakni untuk melegalkan status suami istri, mendapatkan kembali buku nikah, mendapatkan kepastian hukum, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Tujuan tersebut untuk mencapai suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan bagi manusia.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih mengetahui serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak KUA atau penyuluh Agama Islam kepada masyarakat umum agar lebih mengetahui tentang apa yang dianggap baik atau buruk oleh Islam dan Negara.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP MENGENAI <i>AL-MASĤLAĤAH</i> DAN RUJUK DALAM ISLAM.....	23
A. <i>Al-MasĤlahah</i> dalam Islam	23
B. Rujuk dalam Islam.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan serta mengadakan tolong menolong juga memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹ Oleh karena itu Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Jadi jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b bahwa, “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”³

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 9.

² Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215.

Perceraian dapat terjadi karena ada ucapan talak dari suami maupun akibat

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 12.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma, 2009), 55.

Dalam masa *iddah* perempuan ini, seorang suami diperbolehkan untuk kembali dengan jalan rujuk kepada istrinya pada ikatan perkawinan dan memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.¹⁰

Hal ini merupakan satu kesempatan yang diberikan Islam kepada suami yang telah melakukan talak *raj'i* maupun akibat putusan pengadilan sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalin kasih dan membangun kembali rumah tangga yang bahagia. Rujuk dalam Islam merupakan suatu tindakan yang terpuji sebab setelah melalui perceraian kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang pernah terputus sehingga tercipta keutuhan rumah tangga kembali. Sesuai dengan firman Allah Surat At-Thalaq Ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِثُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu”. (QS.65:2)¹¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rujuk yaitu kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah baru dan selagi istri masih dalam masa *iddah* atau masa menunggu, sehingga menghalalkan kembali hubungan antara suami istri.¹² Terdapat perbedaan tata cara rujuk yang ada dalam Fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Menurut fuqaha bahwa rujuk hanya dapat

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat.....*, 320.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* ..., 558.

¹² Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Media Grafika, 2006), 45.

Melihat peristiwa yang terjadi, yakni kebanyakan orang yang tidak mengetahui secara jelas tentang tata cara rujuk yang benar dan sah secara tertulis menurut Agama dan Negara. Dalam prakteknya tidak dipungkiri bahwa masih ada sebagian dari mereka yang melakukan rujuk dalam masa *iddah* yang terjadi akibat dari talak *raj'i* maupun talak 2 yang sudah diputus melalui putusan pengadilan dan sudah keluar akta cerai nya hanya dengan penafsiran yang mereka ketahui berdasarkan Fikih klasik yaitu bahwa rujuk dianggap semata-mata hanya langsung kembali kepada istri selama dalam masa *iddah*, melakukan hubungan suami istri saja, mengucapkan lafaz rujuk langsung pada istri tanpa adanya saksi, serta belum terpenuhinya rukun dan syarat rujuk secara tepat

¹⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* 46.

Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang masih meremehkan dan tidak menghiraukan tentang proses administrasi dan peraturan yang baik dan benar mengenai pencatatan rujuk. Sehubungan dengan peristiwa rujuk yang terjadi antara suami istri akibat talak *raj'i* yang kasus perceraianya sudah dibawa ke Pengadilan Agama, Sudah di putus dan sudah keluar akta cerainya dengan putusan verstek, mereka melakukan rujuk ketika istri masih dalam masa *iddah* berpatokan pada pemahaman mereka saja yaitu rujuk berdasarkan Fikih yang artinya rujuk itu hanya langsung dengan kembalinya melakukan hubungan suami istri saja, tanpa adanya lafaz disertai niat yang jelas, tanpa adanya saksi, tanpa dicatatkan di depan PPN dan disahkan kembali di Pengadilan Agama. Kembalinya mantan suami kepada mantan istri tersebut berlangsung sampai habis masa *iddah* mantan istri dan sampai hamil anak hasil dari rujuk tersebut namun belum dicatatkan di KUA dan tanpa disahkan kembali di Pengadilan Agama, sehingga masing-masing dari mereka masih memegang akta cerai yang di dapat dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan mantan suami tidak mau mencatatkan rujuknya di depan KUA dengan berbagai macam alasan diantaranya persyaratannya yang ribet dan tidak mau susah payah bolak balik ke KUA dan Pengadilan Agama.¹⁵

¹⁵ Ibu Vina, *Wawancara*, Balongbendo, 27 April 2019.

Al-maṣlaḥah merupakan sesuatu yang dapat meraih manfaat dan menolak atau menghindarkan kemudharatan untuk memelihara tercapainya tujuan syariat. *Al-maṣlaḥah* menjadi landasan dalam penetapan hukum karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah itu sendiri, artinya *al-maṣlaḥah* sifat kemaslahatannya tidak dibicarakan oleh dalil-dalil Alquran dan *nas* yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu

¹⁶ Bapak Zakaria, *Wawancara*, Balongbendo, 26 April 2019.

Oleh sebab itu, jika hal tersebut ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana di Indonesia telah mengatur proses tentang tata cara rujuk sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan rujuk itu harus dicatatkan agar bisa mendatangkan sesuatu yang *al-maslahah* di kemudian hari. Pencatatan Rujuk tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.¹⁸ Dengan kedudukannya di Kecamatan, secara otomatis KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Oleh karena itu KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah. Pencatatan pernikahan dan hal-hal yang terkait dengannya merupakan tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk pencatatan rujuk.¹⁹

¹⁷ Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 305.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010), i.

¹⁹ Ibid., 4.

Dari latar belakang inilah maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah penelitian yang berjudul “**Analisis *Al-mas’alahah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk.**”

Dengan mencermati latar belakang diatas, maka ada pembahasan dalam penelitian ini untuk dikaji. Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

- ²⁰ Pasal 30, 31, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fazyatul Maulida, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam”.²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme rujuk dalam fikih dan KHI mempunyai persamaan mengenai rujuk istri yang ditalak *raj’i* dan masih dalam masa *iddah*. Selanjutnya, mengenai nikah *muhallil* terdapat perbedaan menurut Imam empat madzhab yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Dari pendapat Imam empat madzhab tersebut apabila dikorelasikan dengan KHI terdapat perbedaan mengenai mekanisme rujuk, dan dalam KHI tidak membahas diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan *muhallil*. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang tata cara rujuk menurut hukum positif, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode studi komparasi antara fikih dan KHI sedangkan dalam penelitian penulis lebih menjelaskan kepada pendapat kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

²¹ Faziyatul Maulida, “Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

sedangkan konsep rujuk dalam KHI masyarakat

1. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis y

a dengan perkataan dan hanya berdasarkan

ya pada skripsi ini yaitu rujuk setelah masa *iddah*

Sukmajaya belum mengetahui tentang konsep ru

penulis menjelaskan tentang rujuk yang masih da

surat cerai sudah keluar dan masyarakat su

sepe rujuk dalam KHI tetapi tidak mau mencata

kannya.

g disusun oleh Isnaini Rofi'ah yang berjudul "Rel

k dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri A

7 Tentang Tata Cara Rujuk".²³ Dalam skripsi in

- sedangkan konsep Rujuk dalam KHI masyarakat
- . Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis y
- a dengan perkataan dan hanya berdasarkan
- ya pada skripsi ini yaitu rujuk setelah masa *iddah*
- Sukmajaya belum mengetahui tentang konsep ru
- penulis menjelaskan tentang rujuk yang masih da
- surat cerai sudah keluar dan masyarakat su
- sepe rujuk dalam KHI tetapi tidak mau mencata
- kannya.
- g disusun oleh Isnaini Rofi'ah yang berjudul "Rel
- k dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri A
- 7 Tentang Tata Cara Rujuk".²³ Dalam skripsi in

sedangkan konsep Rujuk dalam KHI masyarakat

. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis y

a dengan perkataan dan hanya berdasarkan

ya pada skripsi ini yaitu rujuk setelah masa *iddah*

Sukmajaya belum mengetahui tentang konsep ru

penulis menjelaskan tentang rujuk yang masih da

surat cerai sudah keluar dan masyarakat su

sepe rujuk dalam KHI tetapi tidak mau mencata

kannya.

g disusun oleh Isnaini Rofi'ah yang berjudul "Rel

k dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri A

7 Tentang Tata Cara Rujuk".²³ Dalam skripsi in

sedangkan konsep rujuk dalam KHI masyarakat

1. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis y

a dengan perkataan dan hanya berdasarkan

ya pada skripsi ini yaitu rujuk setelah masa *iddah*

Sukmajaya belum mengetahui tentang konsep ru

penulis menjelaskan tentang rujuk yang masih da

surat cerai sudah keluar dan masyarakat su

sepe rujuk dalam KHI tetapi tidak mau mencata

kannya.

g disusun oleh Isnaini Rofi'ah yang berjudul "Rel

k dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri A

7 Tentang Tata Cara Rujuk".²³ Dalam skripsi in

Dengan adanya hasil kajian pustaka diatas, penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang terletak pada materi penelitian yang telah diteliti. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan tata cara rujuk menurut hukum Islam yang dilakukan penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada analisis *al-maslahah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif, diantaranya yaitu:

1. Segi teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang rujuk secara lisan, tidak ada saksi, tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan hukum positif sehingga tidak mempunyai alat bukti yang autentik. Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan rujuk agar memperoleh pengesahan dan ditetapkan secara tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum.

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pertimbangan hukum serta solusi akibat dari permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat yakni bahwa fungsi dari perlunya pencatatan rujuk di depan Pegawai Pencatat Nikah akan membawa dampak yang *maṣlahah* untuk hidup kedepannya.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis *al-mas’alahah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.” Ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka penulis menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Al-maṣlaḥah*: *Al-maṣlaḥah* yang dimaksud yaitu metode dalam penetapan hukum dimana hal tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk memelihara tercapainya tujuan syariat. Diantaranya adalah *al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyah* dengan memelihara 5 unsur kehidupan manusia yakni memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Didasarkan pada kebaikan-kebaikan yang mewujudkan kemaslahatan manusia untuk menolak dan menghindarkan kemudharatan serta kerusakan bagi kehidupan manusia.²⁶
2. Pendapat Kepala KUA: yaitu suatu pendapat, pemikiran atau gagasan yang disampaikan oleh Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo dalam menilai tentang perlunya pencatatan rujuk.
3. Pencatatan rujuk: Pencatatan rujuk yang dimaksud yaitu pencatatan atau pengesahan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya yakni rujuk yang belum tercatat secara sah menurut Negara. Pengulangan dilakukan dengan cara rujuk tersebut harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA kemudian di sahkan di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara alternatif yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, tersusun secara sistematis atau secara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta sesuai teknis pelaksanaan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan

²⁶ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 102.

²⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 12.

1. Data yang Dikumpulkan

- ## 2. Sumber Data

a. Sumber primer

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

²⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 170.

tokoh masyarakat, warga sekitar yang mengetahui peristiwa rujuk yang tidak dicatatkan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Data yang membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam hal ini meliputi informasi dari penjelasan tetangga yang mengetahui sekilas tentang orang yang melakukan rujuk tidak dicatatkan, pandangan tokoh masyarakat setempat, data dan prosedur rujuk di KUA. Selanjutnya dari beberapa referensi berupa buku-buku untuk menunjang penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan, menjawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.³¹

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan cara lebih terbuka

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

³¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Putra Grafika, 2011), 111.

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.³³ Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan data pasangan suami istri yang pernah melakukan rujuk di KUA, serta buku-buku yang berkaitan dengan *al-maslahah* dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pencatatan rujuk.

Selanjutnya setelah data diperoleh, dan dikumpulkan kemudian diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan data yang ada dan relevansi dengan permasalahan peneliti. Pada penelitian ini data yang akan disaring adalah data pasangan suami istri yang melakukan pencatatan rujuk.

³³Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data.³⁵ Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, Konsep *al-maṣlaḥah* dalam Islam dan rujuk, meliputi pengertian *al-maṣlaḥah*, macam-macam, syarat-syarat, *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. Selanjutnya menjelaskan tentang pengertian rujuk, syarat dan rukun, tata cara pelaksanaan rujuk menurut hukum Islam dan hukum positif, hikmah rujuk.

Bab ketiga, pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, merupakan hasil penelitian yang meliputi profil KUA yang mencakup letak geografis, struktur organisasi, data hasil penelitian di KUA, serta pemaparan mengenai pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

Bab keempat, analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk. Memuat Analisis Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo serta hasil analisis *al-maṣlaḥah* terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran.

KONSEP MENGENAI *AI-MAŞLAHAH* DAN RUJUK DALAM ISLAM

Menurut bahasa *maṣlaḥah* yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan, kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk dijalankan atau ditiadakan, tetapi jika perbuatan tersebut dikerjakan atau dijalankan maka akan membawa manfaat dan menghindari keburukan serta kerusakan.⁵ Kata *al-maṣlaḥah* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia ditulis dan disebut dengan kata maslahat yang berarti suatu hal yang mendatangkan kebaikan, kepentingan, faedah, dan manfaat.⁶

Pengertian *al-maṣlaḥah* tersebut juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a. Imam Al-Ghazali

⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam)* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 113.

Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan dalam kitabnya *Ḍawabit al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmīyah* yang dikutip oleh Dahlan Tamrin, *al-maṣlaḥah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai

syariat bertujuan untuk melindungi dan menghindarkan manusia dari kerusakan atau kemudharatan.¹¹

2. Macam-macam *Al-Maṣlahah*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *al-maslahah* dalam artian syariat bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan atau kemudharatan saja tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima unsur pokok kehidupan diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut macam-macam *al-maslahah* ditinjau dari beberapa segi yaitu:

a. Ditinjau dari tingkat kekuatan *al-maslahah*

Imam asy-Syathibi menjelaskan seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang biasa juga disebut dengan *al-maqāṣid al-shar'iyah* (tujuan-tujuan syariat). Kelima unsur itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan memelihara kelima unsur tersebut merupakan arti dari *al-maṣlaḥah*, sedangkan semua yang bertentangan dengannya disebut dengan *al-maṣḍah*.¹²

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

¹² Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.....*, 308.

Dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Para ulama membagi *al-maṣlaḥah* kepada tiga kategori yaitu: *al-maṣlaḥah ḍarūriyah* (kemaslahatan primer) yang bersifat utama, *al-maṣlaḥah ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yang kedua bersifat sebagai pendukung yang pertama, dan *al-maṣlaḥah taḥsīniyyah* (kemaslahatan tersier) yang ketiga bersifat melengkapi pertama dan kedua.

Yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok manusia yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣālih al khamsah*.¹⁴ Dengan pemeliharaan kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dan tegaknya asasi dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia.

¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1* (Jakarta: Logos, 1996), 115.

2) *Al-maṣlaḥah Ḥājiyyah*

¹⁵ Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 309.

Al-maṣṣlahah dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya atau bisa disebut segi keberadaannya, para ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya pada tiga macam yakni:

itu seluruh ulama sepakat bahwa semua kemaslahatan yang dikategorikan pada *maṣlaḥah mu'tabarāh* wajib ditegakkan dalam kehidupan karena merupakan kepentingan pokok.¹⁹

2) *Al-maşlahah al-mulghah* yaitu *maşlahah* yang berlawanan dengan ketentuan *naş*, dengan kata lain sesuatu yang dianggap *maşlahah* oleh akal pikiran tapi kenyataannya bertentangan dengan syariat.²⁰

3) *Al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syariat dan tidak pula dibatalkan dengan kata lain, *maslahah* dimana tidak ada dalil yang mengakui maupun yang menolaknya.²¹

3. *Al-maṣlaḥah* sebagai Dalil Hukum

Al-maslahah sebagai dalil hukum mengandung artian bahwa *maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah itu sendiri.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *naş* atau *ijmā'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk untuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan atau *mafsadah* dan kemudharatan. Dalam hal itu, setiap '*illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maşlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh

¹⁹ Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul....*, 163

²¹Ibid., 164.

naş di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan bagi manusia baik itu di dunia, maupun di akhirat.²²

Dalam membahas *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama terlebih dahulu meninjau dari segi ada atau tidaknya kesaksian syariat, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak mengakuinya. Mengenai hal ini jumhur ulama membagi *al-maṣlaḥah* pada tiga macam yakni:

- a. *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syariat dalam mengakui keberadaannya. *Al-maṣlaḥah* ini menjadi landasan dalam qiyas (analogi), dan semua ulama sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah* ini merupakan hujjah atau landasan hukum.
- b. *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syariat yang membatalkannya atau menolaknya. *Al-maṣlaḥah* yang kedua ini adalah *bathil* (tidak dapat menjadi hujjah) karena bertentangan dengan *naṣ*.
- c. *Al-maṣlaḥah* yang didalamnya tidak terdapat kesaksian syariat baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *naṣ* tertentu.²³

Sementara itu, Sa'id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa *al-maṣlaḥah* merupakan dalil hukum jika memenuhi lima kriteria (*al-dhawābīṭ*), yaitu kemaslahatan tersebut haruslah:

- Termasuk ke dalam tujuan syariat
- Tidak bertentangan dengan Alquran
- Tidak bertentangan dengan sunnah

²² Al-Ghazali, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh....*, 315.

²³ Ibid., 316.

- Dari ke enam kriteria di atas dapat disimpulkan, bahwa al-Buthi menolak *maṣlaḥah* yang tidak mendapat pengakuan syariat menjadi dalil hukum dan bertentangan dengan syariat disebut dengan istilah *al-maṣlaḥah al-mulghah*.²⁵

Islam

Rujuk

rut syariat rujuk yaitu kembalinya seorang suami
masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*. Dalam bahasa
ri kata *raja'a*, *yarji'u*, *rujū'an* yang berarti
ikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ghazali, Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*...., 123
id Ramadhan Al-Buthi, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...

1. Pengertian Rujuk

Menurut syariat rujuk yaitu kembalinya seorang suami kepada mantan istri dalam masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*. Dalam bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a*, *yarji'u*, *rujū'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rujuk adalah

²⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh....*, 318.

kembalinya suami kepada istri yang ditalak, baik talak satu atau talak dua, ketika istri dalam masa *iddah*.²⁶

Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah “*ruju*” dan istilah “*raja’ah*” yang keduanya semakna yakni berbaikan kembali. Definisi rujuk menurut para ulama yakni:²⁷ Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut:

الرَّجْعَةُ إِسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ فِي أَتْنَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ.

“Rujuk adalah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak (*raj’i*).”

Menurut Ulama Syafi'iyah :

الرَّجْعَةُ إِعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ.

“Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (*raj'i*).”

Sedangkan menurut jumhur ulama, rujuk adalah mengembalikan wanita yang ditalak dan mempertahankan ikatan perkawinannya selain talak *ba'in*, dan talak tiga selama wanita itu masih berada dalam masa *iddah* dan tanpa akad nikah baru. Sehingga, konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* talak *raj'i* (talak satu dan dua).²⁸ Dapat dirumuskan bahwa rujuk yaitu mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ Tihami & Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 327.

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 265.

Dengan terjadinya talak *raj'i*, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa *iddah*, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah. Laki-laki selain bekas suami tidak berhak mengawini bekas istri itu sebelum berakhir masa *iddah* nya. Hak suami untuk merujuk itu menjadi hilang dengan berakhirnya masa *iddah* yang dimaksud.³⁰ Hak merujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak *raj'i* diatur berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 :

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 285.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.” (QS. 2: 228)

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali. Dengan artian tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya merujuk untuk menyengsarakan istrinya, semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain, mempermainkannya atau menyiksanya. Sebab, bekas suami berbuat aniaya dan berbuat zalim itu diharamkan.³¹ Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (QS. 2: 231)³²

Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu istri sedang haid, maka suami wajib merujuk istrinya kembali karena talak di waktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan atau disebut dengan talak *bid'i*. Dengan demikian, status hukum suami merujuk istrinya itu bergantung pada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma, 2009), 37.

tuntunan sunnah. Sehingga dengan demikian hukum suami merujuk bekas istrinya itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, dan bisa jadi haram.³³

Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan istri masih dalam masa *iddah*.

2. Hukum Rujuk

Ibnu Rusdy membagi hukum rujuk kepada dua yaitu hukum rujuk pada talak *raj'i* dan hukum rujuk pada talak *ba'in*.³⁴

a. Hukum Rujuk pada Talak *Raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa selama istri masih berada dalam masa *iddah*, suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhol* (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata. Namun, mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam rujuk disunatkan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hal itu adalah wajib.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara *qiyas* dengan *zahir nas*, yaitu firman Allah:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 289.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 595.

“.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (QS. At-Thalaq: 2)³⁵

Ayat diatas menghendaki wajibnya mendatangkan saksi, akan tetapi mengqiyaskan hak tersebut (yakni rujuk) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya, penggabungan antara *qiyas* dengan ayat tersebut menunjukkan arti hukum sunnah.

b. Hukum Rujuk pada Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Hukum rujuk pada talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja para fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.³⁶

Hukum Rujuk juga telah dijelaskan dalam Pasal 163 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni: “Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*, putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.”³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma, 2009), 558.

³⁶ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 334.

³⁷ Pasal 163 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 111.

- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.
- c. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertekad untuk memperbaikinya. Hal ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan pemulihan terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.⁴²
- d. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini juga sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁴³

Dengan adanya hikmah rujuk di atas maka bagi suami istri yang melakukan rujuk dapat terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang dibenci Islam serta dampak negatif yang ditimbulkan. Sehingga dengan adanya perdamaian (islah) dapat memanfaatkan kesempatan saat masa *iddah* istri dengan jalan rujuk karena merupakan perbuatan yang disukai oleh Islam.

⁴²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 274.

⁴³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 232.

BAB III

A. Profil KUA di Kabupaten Sidoarjo

Kementerian Agama sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang menggerakkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, mempunyai salah satu tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat di bidang pelaksanaan nikah dan rujuk, wakaf, dan kemasjidan. Melalui Kantor Urusan Agama tersebut, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan nikah dan rujuk, sehingga dalam membentuk keluarga memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara hukum agama ataupun hukum pemerintahan.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang berkoordinasi oleh Kepala seksi urusan Agama Islam atau bimas Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal. Jumlah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo ada 17 (tujuh belas) unit KUA Kecamatan.²

Terkait dengan judul skripsi penulis yaitu dari pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, penulis membatasi 3 (tiga) Kepala KUA dalam melakukan penelitian dan wawancara yaitu Kepala KUA Kecamatan Balongbendo, Kepala

¹ Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010), 4.

² Profil KUA Kabupaten Sidoarjo, *KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010*.

1. KUA Kecamatan Balongbendo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo terletak di Jalan Mayjen Bambang Yuwono No. 5. Luas wilayah Kecamatan Balongbendo adalah 25,9 Km² yang terbagi menjadi 20 desa. Kecamatan Balongbendo terletak pada posisi bagian Barat pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan Balongbendo terletak pada jalur strategis jalan raya propinsi menuju Kabupaten Mojokerto, dan bypass menuju Surabaya.³ Jarak dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sekitar 20 km, jarak dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sekitar 21 km dan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur sekitar 26 km.

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah jumlah keseluruhannya yaitu 599. Pada tahun 2019 dari Januari sampai April telah terjadi peristiwa nikah sebanyak 142 pasang suami istri. Menanggapi hal tersebut, selama 2 tahun telah terjadi kasus perceraian sebanyak 97. Jadi pada tahun 2018-2019 belum ada pasangan suami istri yang melakukan rujuk, sehingga tidak terdapat data rujuk yang dapat diperoleh dari KUA. Namun jika pasangan yang melakukan nikah baru akibat perceraian dan kembali setelah masa *iddah* istri habis di KUA Balongbendo terdapat 1 pasang suami istri.

2. Profil KUA Kecamatan Tarik

a. Letak Geografis

Dilihat dari segi geografisnya, Kecamatan Tarik merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat Kabupaten Sidoarjo. KUA Kecamatan Tarik terletak di wilayah Sidoarjo Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak ± 32 km. KUA Kecamatan Tarik tepatnya berada di Jalan Raya Tarik, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁶

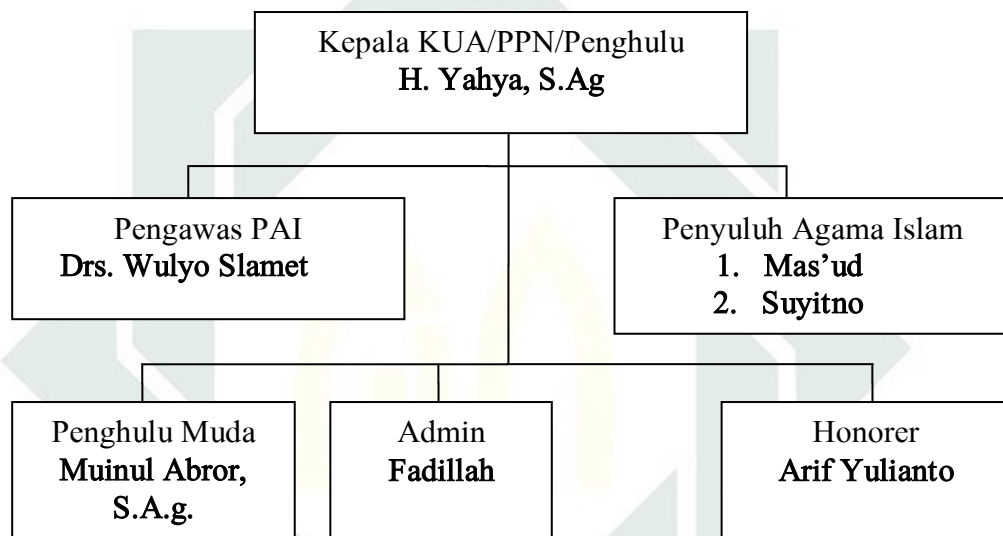
- 1) Sebelah selatan : Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto
- 2) Sebelah timur : Kec. Prambon (Sidoarjo)
- 3) Sebelah utara : Kec. Balongbendo (Sidoarjo)
- 4) Sebelah barat : Kec. Jetis Kab. Mojokerto

⁶ Data dihimpun dari data statistika KUA Kecamatan Tarik

Di Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa, jumlah penduduk Kecamatan Tarik ±63.899 orang, dengan jumlah peristiwa nikah±500 pertahun.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik memiliki struktur pegawai berikut ini:⁷



c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Tarik:

Nama : H. Yahya, S.Ag

NIP. : 19620105199203 1 002

Tempat dan tgl.Lahir : Mojokerto, 05 Januari 1962

Alamat : Ds. Mergosari Kecamatan Tarik

Pangkat/Gol : Penata Tk 1 (III /d)

Jabatan : Kepala / PPN / Penghulu Muda

⁷ Data diperoleh dari Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tarik.

b. Identitas Kepala KUA Kecamatan Prambon⁹

Nama : Mohammad Nasichin, S.Ag M.Pd.I

Usia : 50 Tahun

Tempat/tanggal lahir : Pacitan/ 10 November 1969

Alamat : Ds. Ngrame Kec. Pungging Mojokerto

c. Data Hasil Penelitian

Data mengenai peristiwa rujuk, dari hasil penjelasan Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk kecamatan Tarik \pm 72.359 orang, dengan jumlah peristiwa nikah \pm 800 pertahun. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah keseluruhannya yaitu sebanyak 605, pada tahun 2019 sebanyak 515. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2018-2019 telah terjadi perceraian sebanyak 100 kasus baik itu karena cerai gugat maupun cerai talak. Menanggapi kasus perceraian, pada tahun 2018 telah terjadi 1 peristiwa rujuk, dan di tahun 2019 telah terjadi 1 peristiwa rujuk.

B. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk

Dari hasil penelitian penulis terhadap pendapat Kepala KUA di beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan penelitian penulis yakni di KUA Kecamatan Balongbendo, Tarik dan Prambon tentang perlunya pencatatan rujuk terkait kasus yang terjadi yakni terdapat pasangan suami

⁹ Pak Nas, *Wawancara*, Prambon 25 April 2019. (nama panggilan)

Disini penulis telah mewawancarai beberapa Kepala KUA di wilayah Sidoarjo sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat Kepala KUA dan tokoh masyarakat serta warga yang mengetahui hal tersebut sebenarnya perlu atau tidak rujuk itu untuk dicatatkan. Menanggapi hal tersebut dengan demikian penulis telah mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Responden I adalah Kepala KUA Kecamatan Balongbendo, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Hariyadi, beliau berpendapat bahwa pada saat sekarang ini masih terjadi rujuk yang tidak dicatatkan atau disahkan di KUA. Hal tersebut bisa jadi kemungkinan

¹¹ H. Akhmad Hariyadi, *Wawancara*, Balongbendo, 2 Mei 2019.

Menurut beliau, pencatatan dan pengesahan rujuk itu sangat perlu dan penting dilakukan guna keperluan identitas, untuk memperjelas status pasangan suami istri tersebut, sebagai legalitas pencatatan perkawinan bahwa rujuk telah dilakukan, untuk mengambil akta nikah di Pengadilan Agama dan menyerahkan kembali akta cerai yang didapat, serta untuk status anak yang dihasilkan dari rujuk tersebut, untuk melegalkan masalah hukum dan administrasi, agar tidak menyalahgunakan akta cerai, serta sebagai payung hukum untuk segala urusan yang menyangkut pasangan suami istri yang telah melakukan isbat rujuk tersebut. Masih banyak lagi manfaat yang diperoleh jika rujuk tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pengulangan rujuk atau isbat rujuk yang telah dilakukan dahulu yang belum tercatat itu sangat penting dan perlu untuk dicatatkan dan disahkan kembali.¹²

Responden II adalah Kepala KUA Kecamatan Tarik, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Yahya, beliau berpendapat bahwa rujuk yaitu kembalinya suami kepada istri pada saat masa *iddah*. Pencatatan rujuk yaitu mendaftarkan, dicatat untuk mengesahkan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya. Persyaratan untuk rujuk diantaranya adanya suami yang akan merujuk bekas istrinya, adanya ucapan rujuk, adanya saksi, istri yang ditalak sudah pernah dicampuri, harus dalam masa *iddah* istri, dan lain sebagainya itu menurut Fikih. Untuk prosedur rujuk sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rujuk itu perlu dicatatkan atau disahkan dengan dasar hukumnya yang sudah dijelaskan yaitu dalam KHI pasal 163-169 dan

penting, apalagi menyangkut status dari seseorang supaya jelas, mendapatkan kepastian hukum, dan supaya diketahui oleh masyarakat lain bahwa pasangan tersebut telah rujuk kembali dengan adanya saksi dan alat bukti autentik yang sudah ada. Mengenai permasalahan jika ada peristiwa rujuk yang tidak dicatatkan dan tidak diurus surat menyuratnya di Pengadilan Agama maka banyak mudarat yang akan timbul, diantaranya: masih berstatus cerai, belum mendapatkan pengesahan secara tertulis menurut Agama dan Negara, jika sampai menghasilkan anak dari rujuk tersebut maka anak itu belum tercatat secara sah oleh negara dan masih banyak lagi. Sehingga rujuk yang sudah dilakukan itu harus dilakukan ulang di depan PPN di KUA untuk dicatatkan dan disahkan kembali guna menukarkan buku kutipan rujuk dengan buku nikah yang telah ditarik oleh majelis hakim tempat menyidangkan perkara perceraian tersebut, dalam artian pengesahan rujuk yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pentingnya rujuk itu untuk dicatatkan atau disahkan kembali yakni selain sebagai kepastian hukum juga akan meminimalisir penggunaan akta cerai yang sembarangan, lebih melindungi hak-hak perempuan sebagai istri agar tidak dipermainkan oleh mantan suaminya. Serta untuk mengantisipasi hal-hal yang dilakukan semena mena terhadap akta cerai yang di dapat oleh kedua pasangan tersebut yang terjadi di kemudian hari, karena prosedur rujuk tidak sama seperti awal nikah yang membutuhkan persyaratan banyak, hanya saja rujuk dan nikah sama-sama tetap harus didaftarkan secara tertulis. Berarti intinya rujuk yang sudah dilakukan

tersebut telah melalui jalur Pengadilan Agama harus dicatatkan untuk disahkan kembali secara resmi menurut Agama dan Negara.¹⁸

4. Pendapat Tokoh Masyarakat

Responden IV adalah Tokoh masyarakat Desa di Kecamatan Balongbendo dengan indentitas sebagai berikut:

Nama : H. Zakaria

Tempat dan tgl.Lahir : Sidoarjo, 30 Juni1954

Usia : 65 Tahun

Alamat : Kec.Balongbendo Kab.Sidoarjo

Hasil wawancara penulis kepada Bapak H. Zakaria yakni beliau mengatakan bahwa memang di desa sini tahun 2018 lalu, ada pasangan yang sudah cerai antara seorang perempuan berinisial R dengan suaminya yang berinisial S, sudah dari Pengadilan Agama dengan putusan verstek karena sang istri tidak mau hadir waktu persidangan, dan sudah mendapatkan akta cerai masing-masing pihak sehingga sudah ditetapkan masa *iddah* bagi mantan istri tersebut. Lalu S meninggalkan rumah R selama 2 bulan setengah dan belum habis masa *iddah* istri, sang mantan (S) kembali lagi pulang ke rumah istri tiba-tiba minta rujuk. R pun mau untuk dirujuk hanya dengan perkataan, tanpa adanya saksi dan kumpul lah mereka hingga satu tahun berjalan sampai akhirnya R hamil anak hasil rujuk tersebut.

¹⁸ Ibid.

Dari situlah masyarakat sekitar baru mengetahui bahwa R telah rujuk dengan suaminya yang lama (S), sebelumnya masyarakat tidak mengetahui kalau mereka rujuk dan satu rumah kembali. Pak Zakaria mendengar desas desus dari tetangga dekat R dan S bahwa rujuk mereka adalah dilakukan diam-diam, secara langsung kembali hanya dengan perkataan saja tanpa adanya saksi sehingga, tidak banyak masyarakat yang tahu kalau mereka rujuk, dan mereka melakukan rujuk tersebut hanya berdasarkan pemahaman mereka terhadap fikih. Dikarenakan juga sepengetahuan masyarakat bahwa mereka sudah berpisah dengan cara bercerai melalui pengadilan Agama dengan putusan verstek.

Kemudian pak Zakaria menuturkan bahwa seharusnya pas waktu rujuknya itu perlu dicatatkan dan dilakukan dengan adanya saksi untuk menghindari adanya fitnah dan prasangka buruk yang timbul dihadapan masyarakat sekitar, penilaian masyarakat yang berbeda-beda. Pentingnya dicatatkannya rujuk itu juga untuk memperjelas hubungan suami istri, keturunannya, keluarganya serta mempunyai bukti yang kuat baik dari segi

Agama maupun Negara. Supaya masyarakat juga banyak yang mengetahui bahwa mereka telah rujuk agar khalayak umum mendapatkan informasi yang jelas agar tidak menduga-duga tentang status dari pasangan tersebut. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa rujuk itu penting dan perlu untuk dilakukan pencatatan dan pendaftaran karena banyak faedah serta sesuatu yang bermanfaat diperoleh dari hal tersebut.²⁰

5. Pendapat Masyarakat

Responden V adalah salah satu masyarakat Desa di Kecamatan Balongbendo dengan identitas sebagai berikut: Nama: Vina Sulistya, Sidoarjo 18 Agustus 1974, Usia 47 Tahun. Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Vina yakni Bu Vina merupakan tetangga satu rw dengan pasangan suami istri S dan R, bu Vina menuturkan bahwa ia mengetahui tetangganya itu sudah bercerai lama di Pengadilan Agama dengan suami yang menggugat istrinya. Setelah terjadinya perceraian tersebut mantan suami pun tidak pernah pulang kerumah mantan istrinya itu, namun selang beberapa bulan setelah perceraian itu tiba-tiba mantan suami kembali kerumah mantan istrinya hidup dan tinggal kembali sampai berbulan-bulan lamanya sampai mantan istri tersebut hamil hasil dari kembalinya mantan suami selama tinggal dirumah mantan istri.²¹

Bu vina dan masyarakat lain belum mengetahui secara pasti bahwa mereka itu sudah rujuk atau belum karena sepengetahuan masyarakat bahwa mereka masih bercerai tidak pernah mendatangi atau mengurus

²⁰ Ibid.

²¹ Ibu Vina, *Wawancara*, Balongbendo, 27 April 2019.

²² Ibid.

ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERLUNYA PENCATATAN RUJUK

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang pendapat Kepala KUA di 3 Kecamatan wilayah Kabupaten Sidoarjo yakni KUA Kecamatan Balongbendo, Tarik dan Prambon mengenai perlunya pencatatan rujuk bahwa rujuk yang telah dilakukan itu perlu dan penting dicatatkan untuk disahkan kembali. Hasil wawancara dari beberapa Kepala KUA terkait kasus yang terjadi yaitu setuju dan sangat menganjurkan untuk dilakukan rujuk ulang yang dicatatkan secara tertulis di depan PPN di KUA dan kemudian disahkan di Pengadilan Agama meskipun rujuk tersebut sudah dilakukan ketika istri masih dalam masa *iddah*. Karena dengan adanya pengesahan rujuk tersebut akan mengandung manfaat yang besar bagi pasangan suami istri yang melakukan rujuk dan masyarakat lain.

63

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 164

Pasal 165

Pasal 166

Tata Cara Rujuk

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁵

⁴ Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan Rujuk Pasal 30

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftar Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftar Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.⁷
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Pencatatan Rujuk Pasal 30

- ⁵ Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.
⁶ Pasal 168 Kompilasi Hukum Islam.
⁷ Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam.

- ## Pasal 31

- Adapun buku pedoman Pencatat Nikah di KUA dalam menjalankan tugasnya terdapat petunjuk yang isinya juga memuat tentang pelaksanaan rujuk. Sehubungan dengan hal tersebut proses pencatatan rujuk yakni, orang yang akan rujuk datang bersama-sama dengan bekas istrinya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal bekas istri dengan membawa dan menyerahkan: Surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa (Formulir R1), Akta cerai talak yang diterima dari Pengadilan Agama. Kemudian terlebih dahulu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang akan melakukan rujuk diantaranya:

- ⁹ Ibid., Pasal 31.

Sehingga dengan adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Dirjenbimas, 2004), 39.

B. Analisis *Al-Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk

Mengenai pencatatan rujuk sepanjang keterbatasan penulis dengan menggunakan beberapa rujukan memang tidak dijelaskan dalam literatur buku Fikih, namun jika tentang pengertian rujuk menurut Islam terdapat dalam buku-buku Fikih munakahat. Adapun pencatatan menurut hukum positif sudah banyak yang membahasnya secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam buku tentang pencatatan perkawinan ataupun buku-buku perdata tentang pencatatan nukah dan rujuk yang lain. Rujuk merupakan kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya akibat terjadinya talak *raj'i* selama dalam masa *iddah*.

Di dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut bukan hanya peristiwa perkawinan saja yang dicatat, melainkan jika ada peristiwa rujuk juga harus dicatatkan secara resmi, sebagaimana juga dijelaskan dalam hukum positif yakni peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

Mengingat pentingnya suatu pencatatan sebagai alat bukti yang autentik untuk segala urusan kehidupan manusia sebagai dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah dikemudian hari. Dengan demikian maka perlunya pengesahan rujuk yang didaftarkan dan dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis mengenai *al-mas'alah* terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa semua Kepala KUA setuju dan mengharuskan untuk dicatatkan dan di sahkan kembali rujuk di KUA. Dalam konteks ini rujuk yang terjadi akibat talak *raj'i* yang telah melalui prosedur Pengadilan Agama dan sudah putusan. Melihat peristiwa yang terjadi yaitu rujuk yang telah dilakukan oleh pasangan S dan R sebelumnya adalah berdasarkan pemahaman Fikih klasik yakni yang dilakukan dengan persetujuan dan dengan lafaz saja tanpa adanya saksi dan tanpa dicatatkan. Menurut para Imam madzhab itu sah yang penting masih dalam masa *iddah* istri jadi tidak dicatatkan di KUA. Maka menanggapi hal tersebut selang beberapa waktu kemudian rujuk tersebut harus dilakukan lagi untuk didaftarkan, dicatatkan, dan disahkan kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA untuk mendapatkan pengesahan rujuk secara tertulis dan resmi guna mengembalikan akta cerai yang di dapat ditukar dengan Kutipan Buku Rujuk lalu mengambil kembali buku nikah yang sebelumnya telah di tarik oleh majelis hakim di Pengadilan Agama.

Sehingga pendapat Kepala KUA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bahwa perlu dan pentingnya pencatatan untuk pengesahan rujuk guna memberikan manfaat yang baik kepada pasangan yang melakukan rujuk tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut tentang pendapat

Kemaslahatan tersebut diantaranya adalah tercapainya *al-maṣlaḥah ad-darūriyah* yakni suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Al-maṣlaḥah* tersebut merupakan bagian dari macam-macam *al-maṣlaḥah* ditinjau dari segi kualitas atau tingkat kekuatannya.¹¹ Karena jika seseorang melakukan pencatatan rujuk yaitu mengulang rujuknya untuk mengesahkan kembali rujuk yang telah dilakukan sebelumnya adalah rujuk yang tanpa dicatatkan. Kemudian untuk didaftarkan dan dicatatkan lalu disahkan secara resmi, maka akan dapat terwujud suatu kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, keturunannya, bagi orang lain, serta untuk masyarakat luas.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 309.

1. Dalam hal memelihara Agama yakni jika dilakukan rujuk ulang lalu di sahkan dan dicatatkan kembali rujuk yang telah dilakukan, maka segala aspek dalam eksistensi keagamaan pasangan tersebut akan tercapai dan mendapatkan keselamatan di akhirat karena sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama walaupun di dalam ayat Alquran, hadis maupun *naş* tidak menjelaskan untuk dicatatkan.
2. Memelihara jiwa, maka dengan adanya isbat rujuk, jiwa dari pasangan suami istri yang melakukan rujuk tersebut akan lebih merasa tenang karena sudah mendapatkan ketetapan dan memiliki kepastian hukum mengenai status mereka, selain itu memelihara jiwa supaya terhindar dari perbuatan zina agar salah satu dari pasangan suami istri tersebut tidak menyalahgunakan akta cerai yang diperoleh berkaitan dengan statusnya dikhawatirkan akan berganti-ganti pasangan istri.
3. Memelihara akal, dengan disahkannya rujuk maka secara logika pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri lagi, dan masyarakat banyak yang mengetahui dikarenakan jika sudah disahkan melalui prosedur yang tertulis dan disertai adanya saksi sehingga tidak menimbulkan fitnah.
4. Memelihara keturunan, dalam hal ini jika rujuk tersebut sampai menghasilkan keturunan maka akan terjaga dan terlindungi dalam hal nasab, penulisan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, dan pencatatan administrasi lainnya

1. Dalam hal memelihara Agama yakni jika dilakukan rujuk ulang lalu di sahkan dan dicatatkan kembali rujuk yang telah dilakukan, maka segala aspek dalam eksistensi keagamaan pasangan tersebut akan tercapai dan mendapatkan keselamatan di akhirat karena sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama walaupun di dalam ayat Alquran, hadis maupun *naş* tidak menjelaskan untuk dicatatkan.
2. Memelihara jiwa, maka dengan adanya isbat rujuk, jiwa dari pasangan suami istri yang melakukan rujuk tersebut akan lebih merasa tenang karena sudah mendapatkan ketetapan dan memiliki kepastian hukum mengenai status mereka, selain itu memelihara jiwa supaya terhindar dari perbuatan zina agar salah satu dari pasangan suami istri tersebut tidak menyalahgunakan akta cerai yang diperoleh berkaitan dengan statusnya dikhawatirkan akan berganti-ganti pasangan istri.
3. Memelihara akal, dengan disahkannya rujuk maka secara logika pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri lagi, dan masyarakat banyak yang mengetahui dikarenakan jika sudah disahkan melalui prosedur yang tertulis dan disertai adanya saksi sehingga tidak menimbulkan fitnah.
4. Memelihara keturunan, dalam hal ini jika rujuk tersebut sampai menghasilkan keturunan maka akan terjaga dan terlindungi dalam hal nasab, penulisan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, dan pencatatan administrasi lainnya

maka tidak akan merasa kesulitan karena sudah tertib administrasi dan memiliki payung hukum yang jelas.

5. Memelihara harta, setelah rujuk tersebut disahkan maka harta suami akan digunakan kembali untuk menafkahi istri dan anaknya, dan menghindari pemborosan harta untuk hal-hal yang tidak penting seperti mabuk, berjudi, dan yang mengarah pada perbuatan buruk atau negatif lainnya.

Sehingga dari semua penjelasan tersebut, jika rujuk yang telah dilakukan sebelumnya yakni tanpa dicatatkan maka diharapkan adanya kesadaran hukum pada masyarakat agar mendatangkan suatu manfaat yang baik untuk kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi kehidupan manusia untuk hari yang akan datang sampai seterusnya. Pada hakikatnya *al-maṣlaḥah* itu adalah memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum). Supaya dapat juga dipahami bahwa rujuk yang dicatatkan dan disahkan kembali di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA adalah tidak hanya sah menurut Agama saja tapi juga diakui oleh Negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan tentang perlunya pencatatan rujuk yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 73

Dari segi tingkat kekuatannya sebagai *hujjah* termasuk dalam tingkatan *al-maṣlahah ad-darūriyāh* karena mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan bagi manusia.

B. Saran

Dengan melihat penjelasan diatas, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi masyarakat atau pembaca untuk lebih memperhatikan adanya peraturan yang berlaku mengenai pencatatan rujuk, serta bagi pasangan suami istri yang sudah melakukan rujuk tapi belum mencatatkan rujuknya secara sah dan resmi maka perlu mengulang rujuknya datang ke PPN di KUA untuk mencatatkan lalu mendapatkan pengesahan di Pengadilan Agama. Dengan mentaati peraturan yang berlaku yakni tertib dalam pencatatan administrasi maka hal tersebut berguna untuk mendatangkan dan meraih banyak manfaat dikemudian hari.
2. Disarankan adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak KUA yang lebih mendalam kepada masyarakat, agar mereka mengetahui, paham dan cakap hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul dan Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Putra Grafika, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur''an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma, 2009.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Dirjenbimas, 2004.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: SinarGrafika, 2010.
- Maulida,Faziyatul.“Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”.Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Husnah, Mir'atul. “Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”. Skripsi--IAIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten, 2017.
- Lexy, J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010.
- Nurboko, Choliddan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 1997.
- Ningrum, Rosa Nella Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Rujuk Di Desa Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Tahun 2010-2017”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

- Rofi'ah, Isnaini. "Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Rujuk". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sleman, Zulkarnaen. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad dan Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaifulloh. "Rujuk Antara Teori Dan Praktek (Studi Pada Warga Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istimbath Hukum Islam)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, Grahamedia Press 2014.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017.
- Wawancara, Vina Sulistya, Balongbendo. 27 April 2019.

